



**LAKIP**  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**  
KABUPATEN SUMENEP

## KATA PENGANTAR

Dengan berubahnya kondisi lingkungan, khususnya yang terjadi pada era reformasi dengan demokrasi yang menyangkut aspek ekonomi maupun berbagai aspek lainnya menimbulkan perubahan tantangan, kesempatan dan tuntutan bagi pembinaan dan pengembangan koperasi. Orientasi pembinaan koperasi semakin diarahkan kepada pemberdayaan koperasi melalui penciptaan iklim yang kondusif dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkoperasi serta perkuatan koperasi dengan peningkatan kemudahan akses terhadap sumber modal, teknologi, pasar, informasi, SDM, organisasi dan manajemen.

Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu dibina baik kelembagaan maupun usahanya, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Laporan ini bertujuan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah, dimana bahasan yang terkandung di dalamnya memuat data dan informasi tentang pelaksanaan pembangunan bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah baik kelembagaan maupun sisi usahanya, serta tugas-tugas rutin kedinasan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Walaupun telah diupayakan untuk menyusun laporan ini dengan baik, benar, jelas dan selengkapya namun dirasakan masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam laporan ini. Karena "Tak ada gading yang tak retak" kami berharap input, saran dan kritik membangun untuk penyusunan Laporan yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

Dan pada seluruh karyawan dan karyawan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ini kami mengucapkan terima kasih.

Sumenep, April 2018

KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN SUMENEP



**IMAM TRISNOHADI,SH,MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661130 198803 1 007

## DAFTAR ISI

		Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>iii</b>
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Dasar Hukum .....	1
	B. Gambaran Umum Daerah .....	2
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	
	11	
	A. Visi dan Misi .....	
	11	
	B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	
	13	
	C. Prioritas Daerah .....	
	14	
BAB III	URUSAN DESENTRALISASI .....	
	18	
	A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ...	
	18	
	B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan.....	
	18	
	C. Indikator Kinerja Kunci.....	
	35	
BAB IV	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	
	37	
	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	
	37	
BAB V	P E N U T U P.....	
	38	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum

Mengawali pelaksanaan otonomi daerah yang pemberlakuannya mulai efektif 1 Januari 2001, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menciptakan Efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh aparat pemerintah yang amanah dan profesional.

Keberadaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2017.

Terselenggaranya Kewenangan dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sumenep merupakan salah satu faktor pendukung Pembangunan Daerah melalui Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang efektif dan efisien sehingga memberikan peluang bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dalam perkembangannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 02 Tahun 2011 tentang "Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah" secara terus menerus telah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama dalam rangka terciptanya "**GOOD GOVERNANCE**" melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan hukum/Pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Atas dasar tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus memahami lingkup Akuntabilitasnya masing-masing karena Akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Instansi yang bersangkutan.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Misi agar Akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas.

## **1.2 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep**

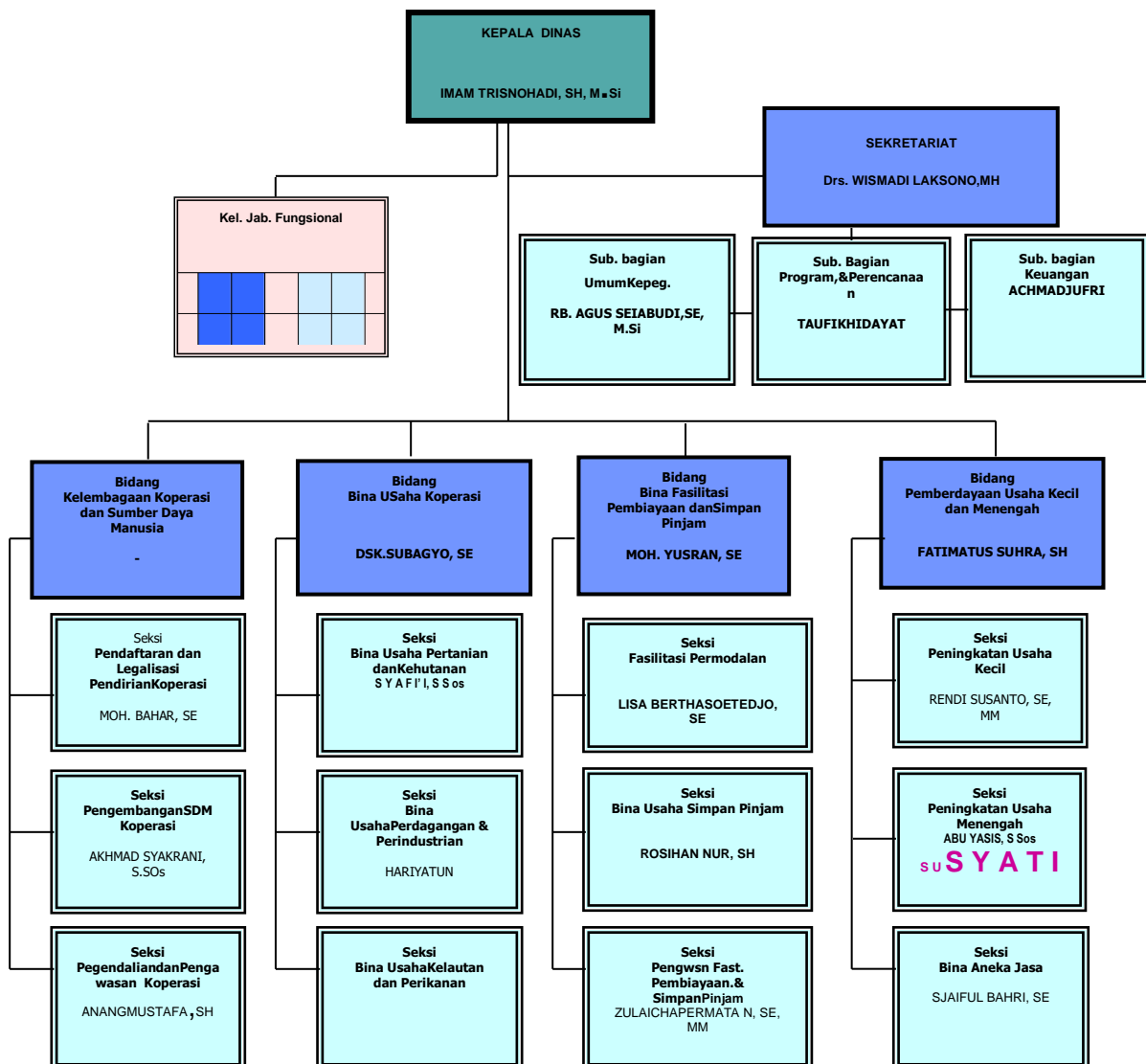
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 16 Tahun 2008 tentang “Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah” dan telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pelaksanaan Otonomi Daerah

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

Secara struktural, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2017 terdiri :

- |                  |   |    |       |
|------------------|---|----|-------|
| 1. Kepala Dinas  | = | 1  | Orang |
| 2. Sekretaris    | = | 1  | Orang |
| 3. Kepala Bidang | = | 4  | Orang |
| 4. Kasubag       | = | 3  | Orang |
| 6. Kasi          | = | 12 | Orang |
| 7. Staf          | = | 16 | Orang |

### 1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Perda Nomor : 9 Tahun 2017 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” menetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah otonom dibidang Pengembangan dan Pembinaan Koperasi di Kab. Sumenep dan tugas pembantuan lain yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikromempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program, perencanaan teknis pendirian dan pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi serta fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pendirian badan hukum koperasi ;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pembinaan kepada masyarakat koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### **1.4 Visi dan Misi**

Guna mewujudkan Eksistensi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep membantu Bupati Sumenep dalam rangka mewujudkan Misi nomor 3 yaitu Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.

### 1.5 Tujuan

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro.

### 1.6 Sasaran

Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep yaitu :

- a. Meningkatnya Kinerja dan usaha Koperasi
- b. Meningkatnya Pertumbuhan usaha Mikro

### 1.7 Identifikasi Permasalahan

Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 - 2021, masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro yang belum tuntas, antara lain :

#### Internal

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang tidak memadai;
2. Kurang tersedianya personel ASN yang memiliki keahlian IT;
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Usaha Mikro, baik yang dilaksanakan oleh SKPD peningkatan SDM PNS di Kabupaten, Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI.

#### Eksternal

1. *Sumber Daya Manusia,*

Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.

### 2. *Permodalan,*

Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan.

### 3. *Pemasaran,*

Permasalahan jaringan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

## 1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementrian Koperasi dan UKM, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sumenep dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

### Tantangan

- a. Tingginya Tingkat Persaingan Usaha
- b. Kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro harus mampu bersaing akibat Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang di tandai adanya Asean Economic Community (AEC)
- c. Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

### Peluang

- a. Berkembangnya produk unggulan daerah
- b. Tersedianya SDM/SDA yang relative besar
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep tahun 2017 yang didasarkan pada tugas dan fungsi, program kerja, visi dan misi instansi serta ditambah dengan adanya Perubahan Anggaran Kerja (PAK) dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu pernyataan / Perjanjian Kinerja antara bawahan terhadap atasan, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep terhadap Bapak Bupati Sumenep, sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kegiatan ekonomi, kualitas kelembagaan UMKM Koperasi dan pengembangan wisata daerah serta meningkatkan kinerja penanaman modal/investasi daerah, industri perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	%	2,94	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Revitalisasi Koperasi 2. Bimbingan Teknis Perpajakan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi 3. Pendampingan Teknis Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah 4. Pemantapan Kelembagaan Koperasi melalui Prinsip-Prinsip Koperasi 5. Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Koperasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						6. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan pada Koperasi Berprestasi 7. Pelaksanaan Upacara Hari Koperasi 8. Magang Anggota Koperasi Bidang Pertanian 9. Pelatihan Batik Tulis Bagi Anggota Koperasi 10. Bimtek Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka peningkatan keterampilan pembuatan olahan hasil pertanian 11. Bimtek Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka peningkatan keterampilan pembuatan aneka olahan rumput laut

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						12. Praktek Kerja Peningkatan Sumber Daya Pengelola Usaha Simpan Pinjam
		2. Persentase Pertumbuhan UMKM	%	17	1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1. Pelatihan Singkat (short course) Melalui Klinik Koperasi Dan UKM 2. Mencetak Wirausaha Muda 3. Pembinaan Kepada Wirausaha Muda melalui bantuan sarana produksi 4. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang pengolahan Roti Kue 5. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Tata Rias Pengantin

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						6. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Anyaman Bambu 7. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan dibidang Bordir 8. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan dibidang Digital Printing Advertaising 9. Pembinaan dan Pelatihan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan dibidang Menjahit 10. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan dibidang Produksi Tahu 11. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 12. Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM melalui Layanan Klinik KUMKM 13. Validasi Data UMKM Penerima Bantuan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						14. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak *performance* masing-masing Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan *Entry Point* untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Dalam Akuntabilitas Kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa : Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

#### A. Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep melaksanakan 1 (satu) sasaran, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

**1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
NO	URAIAN	NO	URAIAN				CAPAIAN
(1)		(2)		(3)			
1	Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	1	Persentase Koperasi sehat	%	2,94	5,72	
		2	Persentase pertumbuhan UMKM	%	17	5,30	

**2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2017	Realisasi Kinerja	
			2016	2017
1	2	3	4	5
Persentase Koperasi Sehat	%	2,94	3,09	5,72
Persentase pertumbuhan UMKM	%	17	5,01	5,30

**3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

Akumulasi realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan daya saing sektor Koperasi dan UMKM dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA TH. 2020	REALISASI KINERJA TH. 2017	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya daya saingsektor Koperasi dan UMKM	1.1. Persentase koperasi sehat	%	3	5,72	
	1.2. Persentase Pertumbuhan UMKM	%	20	5,30	

#### 4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

##### 1. Sasaran : Meningkatnya daya saingsektor Koperasi dan UMKM

##### 1.1. Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Sehat

Indikator ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten dalam membina, mengembangkan dan meningkatkan Koperasi. Persentase Koperasi sehat pada tahun 2017 sebanyak 90 atau 5,72% dari jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam(KSP/USP) yang aktif di kabupaten Sumenep sebanyak 582 sedangkan target Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang sehat mencapai 2,94%.Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) sehat meningkat dikarenakan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan Koperasi dalam mengelolah Koperasi khususnya KSP/USP. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya kegiatan Revitalisasi Koperasi, Bimbingan Teknis Perpajakan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi, Pendampingan Teknis Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah, Pemantapan Kelembagaan Koperasi melalui Prinsip-Prinsip Koperasi, Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Koperasi.

##### 1.2. Indikator Kinerja : Persentase Pertumbuhan UMKM

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2017 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan target 17% dan terialisasi 5,30%, menurunnya target pada tahun 2017 dikarenakan kesalahan Rencana target RPJMD yang terlalu tinggi. Kegiatan yang di laksanakan Pelatihan Singkat (short

course) Melalui Klinik Koperasi Dan UKM, Mencetak Wirausaha Muda, Pembinaan Kepada Wirausaha Muda melalui bantuan sarana produksi. Kegiatan – kegiatan tersebut sangat berdampak baik pada pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep.

## 5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mengukur analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

### COST PER OUTCOME:

#### 1. Alokasi Per Sasaran Penggunaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	919.448.870	12%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	6.765.936.500	88%
			7.685.385.370	

## 2. Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Alokasi	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	
Sasaran 1								
Meningkatnya Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif	78,24%	78,24%	100%	639.200.870	629.980.270	99%	1,44%
Program 1.1 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
Sasaran 2								
Meningkatnya Modal Koperasi	% Peningkatan Modal Koperasi	3%	3%	100%	280.248.000	268.976.000	96%	4,02%
Program 2.1 : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								
Sasaran 3								
Meningkatnya Wirausaha muda	% Peningkatan Wirausaha Muda	50%	50%	100%	4.891.682.000	4.783.850.000	98%	2,20%
Program 3.1 : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								

## 6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung analisi program/kegiatan menunjang keberhasilan sebagai berikut :

- a. Sasaran Program : Meningkatnya Koperasi Aktif dengan indikator program persentase koperasi aktif dengan target 78, 24% dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sumenep terelisasi 78,24% dengan capaian kinerja 100% (sangat berhasil). Keberhasilan ini di dukung program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan pada Koperasi Berprestasi, dengan kegiatan tersebut koperasi yang ada di bina, serta di awasi kelembagaannya, serta di beri penghargaan kepada koperasi yang di nilai berprestasi.
  - Kegiatan Pemantapan Prinsip - prinsip Koperasi, dengan kegiatan tersebut para pengurus dan anggota Koperasi dapat memahami apa itu koperasi, dasar hukum pendirian Koperasi, Pelaksanaan RAT,
  - Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi Revitalisasi Koperasi, dengan kegiatan tersebut koperasi yang kurang aktif di monitoring dan di beri pengarahan, dan apabila koperasi tersebut masih belum aktif akan di lakukan usulan penghapusan ke Kementerian Koperasi  
Keberhasilan kegiatan tersebut efisiensi penggunaan sumber daya dari penyerapan anggaran 99 % dengan tingkat efisiensi 1,44%
- b. Sasaran Program : Meningkatnya Modal Koperasi dengan indikator program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan target 3,00% dan terealisasi 3,00% dengan capaian kinerja 100% (sangat berhasil). Keberhasilan ini di dukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Bimtek Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka peningkatan keterampilan pembuatan olahan hasil pertanian, dengan kegiatan tersebut anggota koperasi di beri pembinaan dan di beri keterampilan pengolahan hasil pertanian untuk menambah pengetahuan manajemen dan meningkatkan penghasilan.
  - Kegiatan Bimtek Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka peningkatan keterampilan pembuatan aneka olahan rumput laut, dengan kegiatan tersebut anggota koperasi di beri pembinaan dan di beri keterampilan aneka olahan rumput laut untuk menambah pengetahuan manajemen dan meningkatkan penghasilan.
  - Kegiatan Praktek Kerja Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Simpan Pinjam, dengan kegiatan tersebut para pengurus koperasi di beri bekal kembali untuk meningkatkan pengelolaan Simpan Pinjam Koperasinya.
  - Pendamping Teknis Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah, dengan kegiatan ini pengurus koperasi mendapat pendampingan dan pembinaan supaya mengerti dan memahami bagaimana teknis akuntansi usaha simpan pinjam pola syariah. Keberhasilan kegiatan tersebut efisiensi penggunaan sumber daya dari penyerapan anggaran 96 % dengan tingkat efisiensi 4,02%
- c. Sasaran Program : Meningkatnya Wirausaha Muda dengan target 50% dan terealisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, keberhasilan ini tercapai karena di dukung program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Mencetak Wirausaha Muda, dengan kegiatan tersebut masyarakat dapat mengikuti pelatihan manajemen tentang berwirausaha dan pelatihan peraktek kerja bermacam – macam jenis usaha. Tujuan utama adanya kegiatan tersebut mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sumenep.
  - Kegiatan Pembinaan Kepada Wirausaha Muda melalui bantuan sarana produksi, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung

wirausaha muda yang sudah mengikuti praktek dan di nilai berhasil akan mendapatkan bantuan sarana produksi untuk mendukung pertumbuhan usahanya.

- Pelatihan singkat (short Course) melalui klinik KUMKM, kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan para wirausaha pemula yang ingin meningkatkan produk usahanya. Keberhasilan kegiatan tersebut efisiensi penggunaan sumber daya dari penyerapan anggaran 98% dengan tingkat efisiensi 2,20%

#### B. REALISASI ANGGARAN

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memerlukan ketersediaan dana yang memadai. Dana dimaksud bermanfaat dalam rangka melakukan pelayanan optimal kepada masyarakat dan untuk melaksanakan program-program dimaksud.

Sumber pemberian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan bersumber dari APBD yang terdiri dari :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan
- e. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- f. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- h. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- i. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Dari 8 (delapan) program belanja langsung tersebut diatas meliputi beberapa kegiatan pelaksanaan dan dapat dilaksanakan dengan kategori baik dimana diperoleh perhitungan kinerja kegiatan sebesar 93,53%.

Untuk belanja lainnya yang dibebankan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. Daftar Realisasi Anggaran Tahun 2017  
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Sumenep**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.15.01.00.00.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	11.330.020.073,00	10.885.594.887,00	96,08
1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.735.236.403,00	2.495.869.215,00	91,25
1.15.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.735.236.403,00	2.495.869.215,00	91,25
1.15.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2.437.336.403,00	2.225.267.965,00	91,30
1.15.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	297.900.000,00	270.601.250,00	90,84
1.15.01.00.00.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.594.783.670,00</b>	<b>8.389.725.672,00</b>	97,61
1.15.01.01.00.5.2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>571.077.400,00</b>	<b>534.783.452,00</b>	93,64
1.15.01.01.01.5.2	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
1.15.01.01.02.5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98.200.000,00	65.755.685,00	66,96
1.15.01.01.08.5.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	59.265.000,00	59.145.000,00	99,80
1.15.01.01.10.5.2	Penyediaan alat tulis kantor	26.465.500,00	26.465.500,00	100,00
1.15.01.01.11.5.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.461.000,00	15.461.000,00	100,00
1.15.01.01.12.5.2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.172.000,00	3.172.000,00	100,00
1.15.01.01.15.5.2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	94.991.900,00	93.980.000,00	98,93
1.15.01.01.17.5.2	Penyediaan makanan dan minuman	22.522.000,00	22.411.000,00	99,51
1.15.01.01.18.5.2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	197.459.667,00	98,73
1.15.01.01.19.5.2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	20.000.000,00	19.933.600,00	99,67
1.15.01.01.26.5.2	Pameran Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
1.15.01.02.00.5.2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>274.880.900,00</b>	<b>274.702.250,00</b>	<b>99,94</b>
1.15.01.02.09.5.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	70.610.000,00	70.610.000,00	100,00
1.15.01.02.10.5.2	Pengadaan mebeleur	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
1.15.01.02.11.5.2	Pengadaan Komputer	89.000.000,00	88.840.000,00	99,82
1.15.01.02.24.5.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44.344.400,00	44.327.000,00	99,96
1.15.01.02.26.5.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00
1.15.01.02.30.5.2	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	9.735.000,00	9.733.750,00	99,99

<b>1.15.01.03.00.5.2</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.15.01.03.02.5.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.000.000,00	15.000.000,00	100
1.15.01.03.04.5.2	Pengadaan pakaian KORPRI	5.000.000,00	5.000.000,00	100
<b>1.15.01.05.00.5.2</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>88,50</b>
1.15.01.05.01.5.2	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	8.850.000,00	88,50
<b>1.15.01.06.00.5.2</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>33.440.000,00</b>	<b>33.302.000,00</b>	<b>99,59</b>
1.15.01.06.01.5.2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.440.000,00	33.302.000,00	99,59
<b>1.15.01.15.00.5.2</b>	<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>833.714.000,00</b>	<b>822.526.750,00</b>	<b>98,66</b>
1.15.01.15.08.5.2	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	36.584.000,00	36.584.000,00	100,00
1.15.01.15.16.5.2	Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM melalui Layanan Klinik KUMKM	770.000.000,00	759.117.750,00	98,59
1.15.01.15.18.5.2	Validasi Data UMKM Penerima Bantuan	27.130.000,00	26.825.000,00	98,88
<b>1.15.01.16.00.5.2</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>4.956.222.500,00</b>	<b>4.848.390.500,00</b>	<b>97,82</b>
1.15.01.16.26.5.2	Pelatihan Singkat (Short Course) Melalui Klinik Koperasi dan UKM	64.540.500,00	64.540.500,00	100,00
1.15.01.16.28.5.2	Mencetak Wirausaha Muda	4.135.000.000,00	4.081.874.500,00	98,72
1.15.01.16.29.5.2	Pembinaan Kepada Wirausaha Muda Melalui Bantuan Sarana Produksi	756.682.000,00	701.975.500,00	92,77
<b>1.15.01.17.00.5.2</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>280.248.000,00</b>	<b>268.976.000,00</b>	<b>95,98</b>
1.15.01.17.09.5.2	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	161.794.000,00	150.522.000,00	93,03
1.15.01.17.38.5.2	Pelatihan Batik Tulis Bagi Anggota Koperasi	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00
1.15.01.17.42.5.2	Bimbingan Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka Peningkatan Keterampilan Pembuatan Olahan Hasil Pertanian	35.727.000,00	35.727.000,00	100,00
1.15.01.17.43.5.2	Bimbingan Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka Peningkatan Keterampilan Pembuatan Olahan Rumput Laut	35.727.000,00	35.727.000,00	100,00
<b>1.15.01.18.00.5.2</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>639.200.870,00</b>	<b>629.980.270,00</b>	<b>98,56</b>
1.15.01.18.12.5.2	Pelaksanaan Upacara Hari Koperasi	165.351.000,00	164.700.500,00	99,61
1.15.01.18.20.5.2	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan pada Koperasi Berprestasi	106.125.000,00	106.125.000,00	100,00
1.15.01.18.21.5.2	Revitalisasi koperasi	48.461.870,00	48.161.870,00	99,38
1.15.01.18.45.5.2	Bimbingan Teknis Perpajakan Perkoperasian bagi Pengurus Koperasi	46.000.000,00	45.800.000,00	99,57
1.15.01.18.55.5.2	Pendampingan Teknis Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah	55.000.000,00	52.584.925,00	95,61
1.15.01.18.58.5.2	Praktek Kerja Peningkatan Sumber Daya Pengelola Usaha Simpan Pinjam	64.312.000,00	60.401.975,00	93,92

1.15.01.18.61.5. 2	Magang Anggota Koperasi Bidang Pertanian	44.752.000,00	43.007.000,00	96,10
1.15.01.18.62.5. 2	Pemantapan Kelembagaan Koperasi Melalui Prinsip-Prinsip Koperasi	79.524.000,00	79.524.000,00	100,00
1.15.01.18.63.5. 2	Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Koperasi	29.675.000,00	29.675.000,00	100,00
<b>1.15.01.19.00.5. 2</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>976.000.000,00</b>	<b>948.214.450,00</b>	<b>97,15</b>
1.15.01.19.41.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dibidang Olahan Roti dan Kue	42.000.000,00	38.639.000,00	92,00
1.15.01.19.42.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dibidang Tata Rias Pengantin	68.000.000,00	65.161.500,00	95,83
1.15.01.19.43.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dibidang Anyaman Bambu	40.000.000,00	34.489.500,00	86,22
1.15.01.19.44.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana di bidang Bordir	210.000.000,00	209.277.000,00	99,66
1.15.01.19.45.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Dibidang Digital Printing Advertising	210.000.000,00	208.697.000,00	99,38
1.15.01.19.46.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana dibidang Menjahit	56.000.000,00	53.853.500,00	96,17
1.15.01.19.47.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Dibidang Produksi Tahu	200.000.000,00	199.125.000,00	99,56
1.15.01.19.48.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui bantuan Sarana produksi dibidang Olahan Roti dan Kue	77.050.000,00	69.786.950,00	90,57
1.15.01.19.49.5. 2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui bantuan Sarana produksi dibidang Olahan Hasil Laut	72.950.000,00	69.185.000,00	94,84

Dari uraian tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa ada sisa anggaran senilai Rp. 444.425.186,- atau sekitar 3,92% dari rencana anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, dengan tingkat realisasi anggaran untuk Tahun 2017 senilai Rp. 10.885.594.887,- atau sekitar 96,08%.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Kepala Daerah. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam, Bidang Kelembagaan Koperasi dan SDM, Bidang Bina Usaha Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam kegiatan tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) sasaran dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata adalah **75,63%** atau termasuk kategori "**SEDANG**".

Laporan Akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep didalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi Tahun Anggaran 2017-2021. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, April 2018

KEPALA DINAS KOPERASI,  
DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN SUMENEP



**IMAM TRISNOHADI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661130 198803 1 007